

Tinjauan Mata Kuliah

Mata kuliah DAPU6107 Kolaborasi Pemerintahan ini dirujuk dari konsep *collaborative governance* (CG) sebagai bentuk perkembangan dari studi *governance*. Berdasarkan kesepakatan umum, para ahli ilmu administrasi publik dan ilmu pemerintahan di Indonesia bahwa istilah *governance* itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai ‘tata kelola’ atau ‘tata kelola pemerintahan’ maka beberapa ahli berpendapat bahwa terjemahan langsung dari istilah CG itu adalah ‘tata kelola kolaboratif’ atau ‘tata kelola pemerintahan kolaboratif’. Kolaborasi pemerintahan sebagaimana yang dirujuk pada Buku Materi Pokok (BMP) DAPU6107 ini mengacu pada konsep CG. Sehubungan dengan hal tersebut, ketika mahasiswa ataupun pembaca BMP ini mendapati istilah ‘kolaborasi pemerintahan’, yang harus ditanamkan pada *frame of thinking* kita adalah berkaitan dengan tata kelola pemerintahan kolaboratif.

Capaian pembelajaran mata kuliah DAPU6107 Kolaborasi Pemerintahan ini adalah mahasiswa dapat menganalisis dan mengevaluasi permasalahan dalam kolaborasi pemerintahan pada era digital. Untuk itu apabila mahasiswa mempelajari modul ini dengan serius dan sungguh-sungguh berdasarkan pola belajar mandiri yang baik dan benar, mengerjakan latihan dan tes formatif yang ada, serta didukung oleh kemauan untuk menelusuri sumber-sumber referensi yang terdapat di setiap akhir modul dan sumber referensi lainnya yang relevan; maka Anda diharapkan memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi penyelenggaraan kolaborasi pemerintahan, khususnya praktik-praktik kolaborasi pemerintahan di Indonesia.

Capaian pembelajaran umum untuk mata kuliah DAPU6107 Kolaborasi Pemerintahan ini sebagai berikut:

1. menjelaskan konsep, pengertian, dan tujuan kolaborasi;
2. menjelaskan bentuk, model, dan dimensi kolaborasi pemerintahan;
3. menganalisis perencanaan kolaboratif;
4. menganalisis kolaborasi pemerintah lokal/daerah;
5. menyintesis kepemimpinan sektor publik dengan kepemimpinan kolaboratif;
6. menyintesis strategi kolaborasi dan peran kepemimpinan dalam *collaborative governance*;
7. mengevaluasi implementasi kolaborasi pemerintahan;
8. mengevaluasi pengambilan keputusan kolaboratif dalam *collaborative governance*; serta
9. mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan kolaborasi pemerintahan.

Secara keseluruhan, mata kuliah DAPU6107 Kolaborasi Pemerintahan ini membahas konsep, pengertian, dan tujuan kolaborasi; pengertian, bentuk, model, dan dimensi kolaborasi pemerintahan; perencanaan kolaboratif; kolaborasi pemerintah lokal/daerah; kepemimpinan kolaboratif pada sektor publik; strategi kolaborasi dan peran kepemimpinan dalam CG; implementasi kolaborasi pemerintahan; pengambilan

keputusan kolaboratif dalam CG; serta evaluasi dan monitoring penyelenggaraan kolaborasi pemerintahan.

Secara terperinci, kesembilan modul dalam BMP DAPU6107 ini sebagai berikut.

Modul 1 membahas tentang konsep, pengertian, dan tujuan kolaborasi yang terbagi dalam dua kegiatan belajar (KB). KB 1 membahas tentang konsep, pengertian, dimensi, dan kolaborasi; sedangkan KB 2 membahas tentang pembentukan dan komponen dasar dalam membangun kolaborasi.

Modul 2 membahas tentang bentuk, model, dan dimensi kolaborasi pemerintahan yang terbagi dalam dua KB. KB 1 membahas tentang pengertian, latar belakang, isu-isu, dan elemen kolaborasi pemerintahan; sedangkan KB 2 membahas tentang bentuk, jenis, model, dan level kolaborasi pemerintahan.

Modul 3 membahas tentang perencanaan kolaboratif yang terbagi dalam dua KB. KB 1 membahas tentang perencanaan dalam organisasi, sedangkan KB 2 membahas tentang perencanaan kolaboratif.

Modul 4 membahas tentang kolaborasi pemerintah lokal/daerah yang terbagi dalam dua KB. KB 1 membahas tentang kolaborasi pemerintah lokal, sedangkan KB 2 membahas tentang kolaborasi pemerintah lokal sebagai manajemen strategi dan strategi manajemen.

Modul 5 membahas tentang kepemimpinan kolaboratif yang terbagi dalam dua KB. KB 1 membahas tentang kepemimpinan sektor publik, sedangkan KB 2 membahas tentang kepemimpinan sektor publik dan kepemimpinan kolaboratif.

Modul 6 membahas tentang strategi kolaborasi dan peran kepemimpinan dalam *collaborative governance*. Modul 6 terbagi dalam dua KB. KB 1 membahas tentang kepemimpinan dalam *collaborative governance*, sedangkan KB 2 membahas tentang kepemimpinan fasilitasi dalam *collaborative governance*.

Modul 7 membahas tentang implementasi kebijakan dalam kerangka *collaborative governance* dan solusi alternatif atas permasalahan yang dihadapi dalam implementasi *collaborative governance*. Modul 7 terbagi atas dua KB. KB 1 membahas tentang implementasi kebijakan, sedangkan KB 2 membahas tentang kunci keberhasilan *collaborative governance*.

Modul 8 membahas tentang pengambilan keputusan kolaboratif dalam *collaborative governance* yang terbagi dalam dua KB. KB 1 membahas tentang pengambilan keputusan dalam organisasi sektor publik, sedangkan KB 2 membahas tentang pengambilan keputusan kolaboratif dalam *collaborative governance*.

Modul 9 mengenai pentingnya *monitoring* dan evaluasi (monev) serta penerapan monev dalam tata kelola pemerintahan kolaboratif. Modul 9 terbagi atas dua KB. KB 1 membahas tentang monitoring dalam *collaborative governance*, sedangkan KB 2 membahas tentang penerapan *monitoring* dan evaluasi (monev) dalam *collaborative governance*.

Manfaat dan Relevansi Mata Kuliah

Mata kuliah DAPU6107 Kolaborasi Pemerintahan ini membekali mahasiswa tentang konsep dan praktik-praktik kolaborasi pemerintahan, khususnya di Indonesia.

Pada akhir proses pembelajaran mata kuliah DAPU6107 Kolaborasi Pemerintahan ini, diharapkan mahasiswa dapat menganalisis dan mengevaluasi penyelenggaraan kolaborasi pemerintahan pada era digital, khususnya praktik-praktik kolaborasi pemerintahan di Indonesia.

PETA KOMPETENSI
DAPU6107/Kolaborasi Pemerintahan/3 sks

